

PENURUNAN EMISI

Penghitungan Batas Dasar Tak Jelas

Jakarta, Kompas - Pembangunan daerah yang tak sinergi dengan pembangunan pusat menjadi kendala upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Target penurunan emisi terancam meleset karena metodologi penetapan batas dasar tak jelas.

Demikian benang merah diskusi ahli "Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia" yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR), Kamis (26/1), di Jakarta. Narasumbernya, Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim dan Pencegahan Lapisan Ozon Kementerian Lingkungan Hidup Sulistyowati, serta Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Yani Saloh.

Diskusi membahas Peraturan Presiden No 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN- GRK) dan Perpres No 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Kedua peraturan itu merupakan tindak lanjut pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK 26 persen hingga 41 persen bila ada bantuan dari luar negeri.

Peserta diskusi menggarisbawahi, sesuai peraturan itu, harus ada rencana aksi daerah untuk penurunan emisi GRK (RAD- GRK). Untuk menyusun RAD- GRK, pemerintah daerah diberi waktu 12 bulan sejak Perpres No 61 keluar. "Tinggal delapan bulan lagi," ujar Virgiyanti.

Di sisi lain, menurut Fabby, Direktur Eksekutif IESR, "Bagaimana akan sinkron? Pada Pasal 6 Ayat 2 Perpres No 61 disebutkan: penyusunan RAD-GRK berpedoman pada prioritas pembangunan daerah. Jadi, kalau suatu daerah mau membuka tambang, ya dibuka saja. Berarti upaya penurunan emisi GRK bisa tidak jalan di sana. Artinya, perpres bersifat opsional dan tidak bisa diimplementasikan penuh."

Kendala lain adalah penentuan batas dasar (baseline) yang metodologinya belum jelas. Menurut Sulistyowati, baseline yang digunakan untuk mengukur pengurangan emisi adalah proyeksi jumlah emisi dalam kondisi business as usual atau tidak ada intervensi apa pun.

Menurut dia, emisi yang dihitung berdasarkan pasokan dengan data dari sektor. Sektor energi, misalnya, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian. Sulistyowati mengatakan, data yang ada belum terkonsolidasi dan belum terkelola baik. Menurut dia, data dari satu sektor saja bisa beragam.

(ISW)